



## **BUPATI BALANGAN**

### **PERATURAN BUPATI BALANGAN**

**NOMOR : 02 TAHUN 2005**

**TENTANG**

### **TUGAS WAKIL BUPATI BALANGAN**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas Wakil Bupati Balangan dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa berkenaan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Wakil Bupati Balangan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS WAKIL BUPATI BALANGAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Balangan;
- b. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan;
- c. Sekretaris Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Camat dan Instansi Vertikal adalah Sekretaris Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Camat, Instansi Vertikal serta unit kerja lainnya dalam Kabupaten Balangan;
- d. Disiplin Nasional adalah sikap mental seluruh masyarakat dari suatu bangsa yang tercermin dalam perbuatan dan perilaku pribadi / kelompok yang patuh dan taat terhadap hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

### **BAB II**

#### **TUGAS**

##### **Pasal 2**

Wakil Bupati mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah;
- c. menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- d. mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan / atau desa;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah;
- g. menangani urusan pengawasan umum yang meliputi :
  1. memantau pelaksanaan kegiatan operasional instansi pemerintah;
  2. memantau tindak lanjut hasil rapat koordinasi pemerintah;

3. menindak lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional pemerintah;
  4. koordinasi penanganan sengketa hukum dan penegakan Peraturan Daerah;
  5. mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP) aparat pengawasan fungsional pemerintah;
  6. melakukan koordinasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- h. Menangani urusan kesejahteraan rakyat yang meliputi :
1. koordinasi pembinaan mental spiritual dan kehidupan beragama;
  2. koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pariwisata dan kebudayaan, generasi muda, pramuka dan olah raga;
  3. koordinasi pembinaan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
  4. koordinasi pembinaan ketenagakerjaan;
  5. koordinasi pembinaan pemberdayaan perempuan dan peranan wanita;
  6. koordinasi pembinaan kependudukan, pemukiman dan lingkungan hidup;
  7. koordinasi pembinaan pengentasan kemiskinan;
  8. koordinasi penanggulangan bencana alam;
  9. koordinasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, minuman keras, kenakalan remaja, wanita tuna susila dan gelandangan.
- i. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 2, Wakil Bupati dapat berhubungan langsung dengan Sekretaris Daerah, Dinas-dinas dan Lembaga Teknis Daerah, Camat, Instansi Vertikal serta Unit Kerja Lainnya.

### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Wakil Bupati dapat mengambil dan menandatangani Keputusan dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum sebagai petunjuk pelaksanaan dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Bupati sepanjang materinya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Wakil Bupati memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

## BAB III

## PENUTUP

## Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

## Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin  
pada tanggal : 7 Oktober 2005

  
BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di : Paringin  
pada tanggal : 10 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

  
H. SYARIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2005 NOMOR 01